

Analisis Kebijakan Maximum Pressure Amerika Serikat Terhadap Iran

Disusun oleh:
Ercha Putri Septova Winarna



**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

ABSTRAK

Amerika Serikat telah mengadopsi strategi penahanan terhadap Iran sejak Revolusi Islam dimulai pada tahun 1979. Pemerintahan Trump telah memulai kampanye “*Maximum Pressure*” untuk membatasi Iran dan membujuknya untuk mengubah perilakunya, berbeda dengan pendekatan peredaan Obama.

Keputusan pemerintah AS untuk menerapkan kembali sanksi dan jaminan keamanan terkait nuklir Iran dan kebijakannya, secara tegas menarik diri dari JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), terbukti meski masa depan kebijakan Trump masih belum diketahui.

Perang antara Washington dan Teheran semakin intensif karena kampanye melawan Teheran untuk melawan tekanan AS.

Artikel ini menggunakan teori konstruktivis untuk menganalisis inisiatif kebijakan Iran dari pemerintahan Trump dan untuk melihat berbagai alat yang digunakan AS untuk menerapkan doktrin *Maximum Pressure*.

Berkas tersebut menambahkan bahwa jika Iran tidak mengubah perilakunya, pemerintahan Trump berharap untuk mempercepat kejatuhan rezim tersebut dengan memberlakukan hukuman ekonomi yang ekstensif, meningkatkan tekanan diplomatik, dan mempertahankan pencegahan militer.

Kata Kunci: *Kebijakan Luar Negeri, Konstruktivisme, Maximum Pressure, Amerika Serikat, Iran.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus memanas sehingga menimbulkan ketegangan dan permusuhan antara kedua negara. Belakangan ini, intelijen AS melaporkan bahwa Iran diam-diam telah memindahkan misilnya ke Irak untuk meminimalkan dampak serangan AS setelah dirilisnya rencana pertimbangan jumlah pasukan AS di Timur Tengah oleh Donald Trump. Arsitektur keamanan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) telah mengalami pergolakan bersejarah sejak pemberontakan Arab tahun 2011 ketika kawasan itu diserang oleh kekuatan ekstra-regional dan persaingan geopolitik yang sengit di antara kekuatan-kekuatan regional setelah mendapatkan kecepatan. Rusia, Turki, Iran, dan Amerika Serikat baru-baru ini meningkatkan keterlibatan militer dan aktivisme kebijakan luar negeri mereka di wilayah tersebut; Arab Saudi, Israel, dan Qatar telah melakukannya pada tingkat yang lebih rendah. Mengingat meningkatnya rasa kepergian AS dari Timur Tengah dan rencana besar “America First” Donald Trump, dinamika ini menjadi jauh lebih terlihat.

Sementara ini berlangsung, hubungan antara AS dan Iran terus memburuk, bolak-balik antara konfrontasi militer tidak langsung dan jeda strategis. Trump melaksanakan salah satu janji kampanyenya dan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) yang dicapai pada 2015 antara Iran dan P5+1 pada Mei 2018, setelah secara terbuka mengaitkannya dengan perdamaian pemerintahan Obama dengan Iran (Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Jerman, UE, dan Amerika Serikat). JCPOA diganti dengan kampanye *Maximum Pressure*, dan semua sanksi terkait nuklir sebelumnya terhadap Teheran dilanjutkan oleh administrasi Trump. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan dalam pidatonya bahwa Iran akan segera tunduk pada pendekatan baru dari AS yang akan menempatkan Iran di bawah tekanan ekonomi terbesar. Namun, Iran mengabaikan pernyataan itu. Meskipun ancaman *Maximum Pressure* dapat dianggap sebagai ancaman besar, namun kebijakan ini belum berhasil mencapai tujuan utamanya. Namun, Indonesia memiliki ikatan yang kuat baik dengan AS maupun Iran, sehingga konflik tersebut tidak akan berdampak pada hubungan bilateral keduanya. Keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI ke Iran atau memberlakukan pembatasan perjalanan menunjukkan kemandirian Indonesia dalam menanggapi krisis di Iran. Pemerintah tidak tertarik terjebak dalam konflik pemikiran yang dimulai oleh negara yang ingin mengisolasi Iran. Pemerintah Indonesia tentu akan berdiskusi dengan pemerintah Iran bahkan jika memulangkan warganya dan menarik diplomatnya karena tidak ingin merusak reputasi Iran di luar negeri.

TINJAUAN LITERATUR

Konstruktivisme

Konstruktivisme berasal dari bahasa Inggris yaitu construct yang berarti kaum konstruktivis melihat dunia sebagai hasil dari proses interaksi antara sekelompok individu atau negara dengan lingkungan yang lebih luas. Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan teoritis dalam bidang Hubungan Internasional yang populer pada tahun 90-an setelah berakhirnya perang dingin. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pentingnya etika internasional budaya, norma, dan identitas dalam hubungan internasional antar negara. Teori ini menitikberatkan pada kesadaran kolektif manusia yang mengacu pada konsep ide dalam kegiatan hubungan internasional.

Pendekatan konstruktivisme ini dapat menganalisis suatu norma dan aktor dalam suatu kelompok yang membentuk fungsi politik global yang menjalankan aktivitas internasional. Pakar pendekatan konstruktivis berpendapat bahwa aktivitas sosial memiliki hubungan yang erat dengan politik internasional. Dapat dikatakan bahwa konstruktivisme ini sangat penting bagi kebijakan dalam negeri. Hal ini karena konstruktivisme memberikan keputusan dan pengaruh lingkungan internasional dalam kegiatan hubungan internasional ketika menghadapi konflik dan juga menjalin kerjasama. Kaum konstruktivis percaya bahwa sejumlah konsep yang termasuk dalam norma internasional juga berdampak pada perilaku aktor negara dan non-negara dalam komunitas internasional, terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak mengabaikan peran dan pengaruh kekuatan material seperti kekuatan bersenjata.

Pendekatan Konstruktivis terhadap Kebijakan Luar Negeri

Pendekatan yang dipilih oleh pembuat kebijakan suatu negara mempengaruhi hasil dari pembuatan kebijakan tersebut. Konstruktivisme melihat bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan dan adanya birokrasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada kepentingan dan gagasan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, seperti budaya, norma, dan institusi dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Analisis

kebijakan luar negeri dari perspektif konstruktivis, dibandingkan dengan perspektif realis dan liberalis, sangat membutuhkan proses analitis, mengingat mekanisme ini memasukkan motif birokrasi dan kepentingan nasional ke dalam pengambilan keputusan, cenderung menjelaskan banyak hal.

Menurut pendekatan konstruktivisme, terdapat beberapa asumsi dasar dalam membuat kebijakan luar negeri. Pertama, motivasi tindakan tokoh dalam hubungan internasional merupakan faktor penting. Hal ini karena lingkungan sosial pada dasarnya hanyalah hasil konstruksi manusia yang pada akhirnya masuk dalam wilayah intersubjektif. Kemudian, konstruktivisme mencoba menghubungkan struktur dan institusi dengan teori ini. Pengaruh dan dampak kehadiran struktur menunjukkan bahwa struktur itu benar-benar ada dan memiliki konsekuensi yang berarti. Analisis konstruktivis berfokus pada kepentingan yang diciptakan dan bagaimana peran norma dan institusi dalam pembuatan kebijakan. Hal ini karena penganut paham konstruktivisme beranggapan bahwa mereka tidak terlalu memperdulikan peran kepentingan karena memposisikan diri sebagai perantara.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Maximum Pressure

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, penarikan Amerika Serikat dari JCPOA pada 8 Mei menandai awal penerapan tidak resmi Kebijakan *Maximum Pressure* ke Iran. Tanpa kewajiban JCPOA, tindakan ini memberi AS kebebasan untuk sepenuhnya menyatakan keinginannya untuk membuat kesepakatan baru. Amerika Serikat kemudian dapat membalikkan semua keputusan pemerintah sebelumnya dan bahkan dapat memulai garis kebijakan baru yang bertujuan untuk menekan Iran melalui berbagai cara, seperti sanksi, yang dilarang di bawah eskalasi JCPOA. Namun, mengutip penjelasan dari utusan khusus AS untuk Iran, yang juga menjabat sebagai penasihat kebijakan luar negeri AS Brian Hook, kebijakan “*Maximum Pressure*” diterapkan tepat dua minggu setelah AS mundur dari JCPOA. Pada tahun 2018, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan pidato berjudul “Pasca-Perdagangan: Strategi Iran Baru” pada konferensi pers dengan *Heritage Foundation*, di mana dia mengatakan *Maximum Pressure* adalah tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran.

Pada September 2019, ia menjadi Penasihat Keamanan Nasional ketiga pemerintahan Trump setelah Trump memecat John Bolton, seorang Republikan senior yang dikenal karena gayanya yang agresif dan sangat militeristik. Upaya sebelumnya untuk berjuang dan melawan menyebabkan pengusirannya dari Gedung Putih. Upaya pertama pemerintahan Donald Trump untuk menerapkan *Maximum Pressure* setelah penarikannya dari JCPOA adalah dengan mengeluarkan memorandum presiden yang mengancam tekanan ekonomi maksimum terhadap Iran. Jika Teheran tidak segera mematuhi dalam 90 hari, Amerika Serikat akan, pada langkah pertama, mencabut beberapa sanksi yang dicabut sebelumnya terhadap Iran, termasuk sanksi atas pembelian dolar Iran dan serangkaian pembatasan perdagangan Iran seperti perdagangan emas, batu bara, besi, aluminium, teknologi dan segala bentuk atau sektor utang pemerintah. Jika Iran terus gagal memenuhi sektor ekspor minyak Iran maka operasi perbankan Iran dan seterusnya akan dipulihkan. Pelabuhan dan kapal kargo Iran adalah contoh industri keuangan, transportasi, dan logistik. Setelah tidak mendapat tanggapan dari Iran dalam waktu 90 hari, Amerika

Serikat memutuskan untuk mengeluarkan apa yang disebut EO Iran Baru, untuk menetapkan dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk mengamankan penerapan semua ancaman. Tawaran itu dimulai dengan mencabut sembilan lisensi untuk eksportir makanan dan komoditas Iran dan memberlakukan larangan pembelian pesawat komersial dan peralatan transportasi Iran.

Upaya Amerika Serikat dalam Menerapkan Kebijakan Maximum Pressure

Menurut *Regional Security Complex Theory* (RSCT) suatu negara mengalami kerentanan jika ketakutan keamanannya terkadang membuat negara atau kelompok negara lain menjadi ancaman struktural meskipun negara tersebut tidak berniat untuk bermusuhan. Soviet mengembangkan sistem pengekangan kekuasaan negara sebagai akibat dari ketidakamanan yang dihasilkan untuk mempertahankan aturan. Dalam melakukannya, Amerika Serikat mengambil pendekatan faksi, dan komite regional Republik Islam non-tradisional menyediakan segala cara yang memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk mengatur ulang keamanan dokumen Iran. Tindakan ini juga mendorong *Tel Aviv* untuk mulai memulihkan hubungan dengan dunia Arab, seperti yang dilakukan baru-baru ini ketika menjalin kembali hubungan dengan Uni Emirat Arab, dan membantu Israel dalam menggambarkan Iran sebagai musuh utama negara-negara Arab. Trump dan staf keamanan nasionalnya, tidak seperti pemerintahan sebelumnya, menganggap organisasi ekstremis Sunni seperti Al-Qaeda dan ISIS sebagai ancaman serta kelompok militan Syiah sebagai ancaman. Amerika Serikat dan Israel berusaha menghentikan ekspansi regional Iran dengan menyoroti hubungan unik Republik Islam itu dengan Palestina dan organisasi militan lainnya seperti Hizbullah. Mereka juga berharap dapat membujuk sekutu mereka untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mencabut dan menegakkan sanksi terhadap Teheran dan selanjutnya mengisolasinya.

Strategi Iran Menghadapi Kebijakan Maximum Pressure

Maximum Pressure telah membedah seluk-beluk dan kompleksitas kebijakan *Maximum Pressure* pemerintahan Trump. Iran, bagaimanapun, tidak menyerah dengan mudah dan mengembangkan rencana untuk menjamin kelangsungan pemerintahan tanpa harus menyerah pada

tekanan Amerika atau bahkan menghadapi risiko bentrokan militer yang dahsyat. Selain itu, Iran menjaga hubungan dengan organisasi internasional yang dapat menghambat proses pemulihan dan memanfaatkan embargo senjata yang akan datang berdasarkan Resolusi 2231. Tujuan dari konsep ketahanan ekonomi adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi Iran terhadap guncangan eksternal jangka panjang, seperti potensi Sanksi Barat dan krisis keuangan global. Strategi ekonomi Iran saat ini adalah mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan berbasis teknologi informasi. Sementara membangun sistem aliran modal yang terpisah, reformasi pasar keuangan domestik dan membatasi integrasi ke dalam ekonomi global membantu mengurangi kerentanan terhadap krisis global.

KESIMPULAN

Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran terus memanas sehingga menimbulkan ketegangan dan permusuhan antara kedua negara. Donald Trump baru-baru ini mengumumkan proposal untuk meninjau jumlah tentara AS yang ditempatkan di Timur Tengah, dan intelijen AS baru-baru ini melaporkan bahwa Iran secara diam-diam telah mengirimkan rudal ke Irak untuk mengurangi dampak serangan AS. Ketegangan yang terjadi antara kedua negara bermula dari pecahnya pemberontakan Arab pada tahun 2011. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran terus memburuk, terombang-ambing antara konfrontasi militer tidak langsung dan konfrontasi strategis antara Amerika Serikat dan Iran. Trump menghormati janji kampanye dan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA), yang dicapai pada Januari 2018, pada Mei 2018, setelah secara terbuka mengaitkan perdamaian dengan Iran dengan pemerintahan Obama. JCPOA dicapai pada tahun 2015 antara Iran dan negara-negara P5+1. Administrasi Trump menggantinya dengan kampanye *Maximum Pressure* dan mengembalikan semua sanksi sebelumnya terhadap Teheran terkait dengan program nuklirnya.

Secara garis besar, kebijakan *Maximum Pressure* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat memiliki dua tujuan yaitu, Amerika Serikat bermaksud menghentikan sepenuhnya pengembangan dan pembaharuan program rudal nuklir dan balistik Iran, dan kedua, membawa Iran ke dalam pengaruh AS di Timur Tengah. dan memanfaatkan kondisi ideal bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa dari tujuan tersebut telah membuka jalan bagi Iran untuk datang ke meja perundingan dan menyusun kesepakatan baru dengan Amerika Serikat yang disebut Trump sebagai “kesepakatan baru”. Ada beberapa hal yang dilakukan Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan *Maximum Pressure* terhadap Iran. Yang pertama adalah mengembalikan Iran dan obsesi Syiahnya, mengeksploitasi alternatif yang didukung Iran untuk menjaga keamanan Amerika Serikat dan sekutu regionalnya, dan mencegah ancaman militer.

REFERENSI

- Alkholid, A. M., & Taufiq, F. (2021). Hubungan Iran-Amerika Serikat Masa Pemerintahan Hassan Rouhani (Telaah Perjanjian JCPOA). *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 8(1), 1-25. doi:10.7454/meis.v8i1.133
- Azizi H., Golmohammadi V, Vazarioan A. (2020), Trump’s “maximum pressure” and anti-containment in Iran’s regional policy, “Digest of Middle East Studies”, Vol. 29(2).
- Dugis, V. (2018). Teori hubungan internasional: (perspektif-perspektif klasik). editor, Vinsensio Dugis. Surabaya: Airlangga University Press.
- Iskandar, R., Ambarwati., & Putra, M. (2022). ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM BELT AND ROAD INITIATIVE. *Jurnal Dinamika Global*, Vol.7(1), 84-105.
- Mousavian M. S. Mousavian M. M. (2018), Building on the Iran Nuclear Deal for International Peace and Security, *Journal for Peace and Nuclear Disarmament. Journal for Peace and Nuclear Disarmament. Vol. 1(1)*.
- Nurtyandini, R. T. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA JOE BIDEN TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN. *Jurnal PIR*, Vol. 6(2), 139-152.
- Rokhayati. (2017). AMBIVALENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN. *Global Insight Journal*, Vol.2(1), 228-245.
- Simon, S. (2018), Iran and president Trump: What is the endgame? *Survival*, Vol. 60(4).